



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6486>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PEMETAAN BIBLIOMETRIK PENELITIAN BERTEMA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2016–2026

Annisa Rahmadanita^{1*}, Agung Nurrahman²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno No.20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author : anis@ipdn.ac.id

Received: 15-07-2026, Accepted: 17-09-2026; Published Online: 21-09-2026

ABSTRAK

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala umum yang dihadapi meliputi kendala sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan dalam menganalisis hal tersebut, namun belum banyak penelitian yang melakukan pemetaan untuk menentukan arah perkembangan tren riset ini secara komprehensif. Tujuan penelitian adalah untuk mengisi celah metodologis tersebut dengan memetakan perkembangan penelitian ilmiah perlindungan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik dengan menggunakan *tools* VOSviewer, pada 25 artikel jurnal terbitan tahun 2016 s.d. 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan mencapai puncak publikasi pada tahun 2022, sebelum akhirnya mengalami penurunan jumlah publikasi yang tajam pada tahun-tahun berikutnya. Hasil visualisasi jaringan dan peta kepadatan menunjukkan adanya ketimpangan fokus kajian, bahwa literatur saat ini didominasi oleh isu regulasi darurat pascapandemi dan penegakan hukum formal. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya ketimpangan fokus kajian ilmiah dan merekomendasikan orientasi riset masa depan menuju penguatan perlindungan masyarakat secara integratif berbasis ekologi dan kearifan lokal di berbagai daerah.

Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Perlindungan Masyarakat; Satlinmas; Ketenteraman dan Ketertiban Umum; VOSviewer

Abstract

Public protection is a mandatory basic service mandated by Law Number 23 of 2014. However, its implementation faces common challenges regarding human resources, budgets, and infrastructure. While various scientific studies have analyzed this subject, few have comprehensively mapped the trajectory of research trends in this field. This study aims to address this methodological gap by mapping the evolution of scientific research on public protection in Indonesia. A bibliometric analysis was conducted using VOSviewer. The results indicate a significant year-on-year increase in research activity, peaking in 2022 before experiencing a sharp decline in publication volume in subsequent years. Network visualization and density mapping reveal an imbalance in research focus, with current literature dominated by issues concerning post-pandemic emergency regulations and formal law enforcement. In

conclusion, this study identifies an imbalance in the focus of scientific inquiry and recommends that future research shift toward an integrative approach to strengthening public protection—one grounded in ecology and local wisdom across various regions.

Keywords: *Bibliometric Analysis; Public Protection; Satlinmas (Community Protection Unit); Public Peace and Order; VOSviewer*

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar, diantaranya berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur urusan perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Disamping itu, telah diatur pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 terkait dengan unsur Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri.

Menurut Nugroho & Supardal (2022), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan komponen yang memiliki kontribusi kuat dalam pelaksanaan fungsi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Indonesia. Dikutip melalui Dahuri (2022), bahwa terdapat inventarisasi permasalahan yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan Satlinmas di daerah, diantaranya berkaitan dengan sumber daya

manusia dan anggaran, sehingga memengaruhi pencapaian mutu Standar Pelayanan Minimal Satlinmas tersebut.

Berbagai publikasi ilmiah telah banyak membahas topik perlindungan masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hasim (2022) menyatakan bahwa terbatasnya anggaran masih menjadi kendala yang dihadapi sehingga berimplikasi pada minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan tugas di lapangan. Aspek sumber daya manusia pun disinggung oleh Masrinanda & Pujayanti (2025); Sesa et al (2026) yang menegaskan perlunya pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kualitas Satlinmas tersebut. Memperkuat hal tersebut, temuan penelitian Azima (2019) menjelaskan bahwa dibutuhkan penambahan jumlah personal agar pelaksanaan Satlinmas ketika di lapangan dapat terselenggara lebih optimal.

Berbagai penelitian tersebut umumnya mengkaji peran dan fungsi Satlinmas dan menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat Linmas dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara itu, publikasi ilmiah yang

memetakan lanskap perkembangan riset perlindungan masyarakat di Indonesia belum banyak dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah metodologis tersebut yaitu penulis berupaya untuk menganalisis tren penelitian perlindungan masyarakat secara spesifik di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan perkembangan penelitian perlindungan masyarakat di Indonesia melalui pendekatan analisis bibliometrik. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan jumlah publikasi bertema perlindungan masyarakat di Indonesia?; 2) Siapa penulis paling produktif?; 3) Bagaimana perkembangan tema dari waktu ke waktu?; 4) Tema apa yang masih jarang diteliti?. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam perumusan isu terbaru yang masih jarang dieksplorasi untuk kemudian dianalisis lebih dalam bagi penelitian masa depan.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perlindungan Masyarakat

Makna perlindungan masyarakat secara teoretis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu makna sempit dan luas. Menurut Eviany & Sutiyo (2023), secara sempit, perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai fungsi Satlinmas, yang merupakan organisasi dengan anggota

masyarakat. Adapun lebih lanjut dijelaskan bahwa definisi secara luas, dapat bermakna sebagai segala usaha yang dilakukan pemerintah bagi masyarakatnya dalam memberikan perlindungan dan pengamanan dari berbagai jenis ancaman yang dapat terjadi (Eviany & Sutiyo, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan upaya yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, dan membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakatnya agar fungsi perlindungan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai efektif dan efisien. Eviany & Sutiyo (2023) menjelaskan bahwa sasaran dari perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah masyarakat, karena masyarakat dapat berada pada situasi yang rawan bencana dan rentan secara sosial serta ekonomi.

B. Perbedaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satlinmas merupakan kelembagaan pemerintah pada tingkat desa yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya ketenteraman dan keamanan masyarakat (Yusmiarni, et al., 2023). Lebih lanjut disebutkan bahwa sinergi antara elemen masyarakat yang terwadahi dalam Satlinmas, dengan unsur TNI dan Polri

merepresentasikan perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dalam memelihara kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harsoyo, 2021).

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan upaya dan kegiatan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat diantaranya dari gangguan akibat bencana, memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga mendorong upaya pertahanan negara. Adapun Satlinmas merupakan wadah organisasi yang di dalamnya meliputi elemen masyarakat untuk menyelenggarakan Linmas.

C. Konsep Bibliometrik

Donthu et al. (2021) menyatakan bahwa analisis bibliometrik merupakan metode kuantitatif berbasis statistik untuk menyajikan pemetaan literatur ilmiah, mengukur tren perkembangan riset, dan mengidentifikasi struktur pengetahuan pada suatu bidang keilmuan tertentu. Salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam analisis bibliometrik adalah penggunaan teknik Co-occurrence. Alasan penggunaan teknik tersebut adalah untuk mendeteksi seberapa sering dua istilah atau konsep yang dikaji, muncul secara bersamaan dalam judul, abstrak, atau kata kunci dari

berbagai artikel yang telah dikumpulkan (van Eck & Waltman, 2014).

D. Konsep *Network*, *Overlay*, dan *Density Visualization*

Terdapat tiga moda pemetaan utama dalam visualisasi hasil Co-occurrence menggunakan perangkat lunak VOSviewer, sebagaimana yang disampaikan oleh van Eck & Waltman (2010), yaitu: 1) *Network Visualization*, yang menampilkan jejaring keterkaitan antar kata kunci berupa node lingkaran dan garis penghubung; 2) *Overlay Visualization*, yang menampilkan evolusi atau perkembangan tren topik penelitian berdasarkan kebaruan waktu publikasi; 3) *Density Visualization*, yang menampilkan tingkat kejenuhan atau konsentrasi riset pada bidang tertentu.

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik untuk memetakan tren penelitian perlindungan masyarakat di Indonesia. Penelitian menggunakan database yang diperoleh melalui lens.org. Alasan pemilihan database akademik lens.org karena lens.org dapat mengintegrasikan data bibliografis PubMed, Crossref, CORE, sehingga mampu menjangkau jurnal-jurnal nasional terindeks SINTA yang kadang tidak terindeks sepenuhnya di Scopus atau Web of Science. Di sisi lain, topik “Perlindungan

Masyarakat” dan “Satlinmas” merupakan isu spesifik tata kelola pemerintahan di Indonesia, sebagian besar artikel

berkualitas terbit pada jurnal nasional terakreditasi yang terekam secara komprehensif melalui lens.org.

IDENTIFIKASI

Hasil pencarian awal database Lens.org dengan kata kunci “Perlindungan Masyarakat” OR (Linmas OR Satlinmas) (n = 2.634 dokumen)

PENYARINGAN

- a. Terbit sebelum tahun 2016 (n = 312)
- b. Tipe publikasi non-jurnal/buku/prosiding (n = 540)
- c. Tidak memiliki DOI (n = 215)
- d. Artikel Pengabdian Masyarakat (n = 448)
- e. Di luar konteks geografis Indonesia (n = 204)

DITERIMA

Jumlah akhir artikel jurnal yang memenuhi kriteria untuk dianalisis (n = 915 dokumen)

Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Protokol PRISMA

Penjaringan awal dilakukan menggunakan kata kunci “Perlindungan Masyarakat” OR (Linmas OR Satlinmas), dan diperoleh sejumlah 2.634 artikel. Kemudian penulis menentukan kriteria tertentu untuk melakukan pembatasan jumlah dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun pembatasan kriteria yang digunakan adalah tahun terbit publikasi yaitu tahun 2016 s.d. 2026, tipe publikasi artikel jurnal yang memiliki DOI, dan penelitian dilaksanakan di Indonesia. Jumlah dokumen setelah dilakukan pembatasan kriteria adalah 915 artikel.

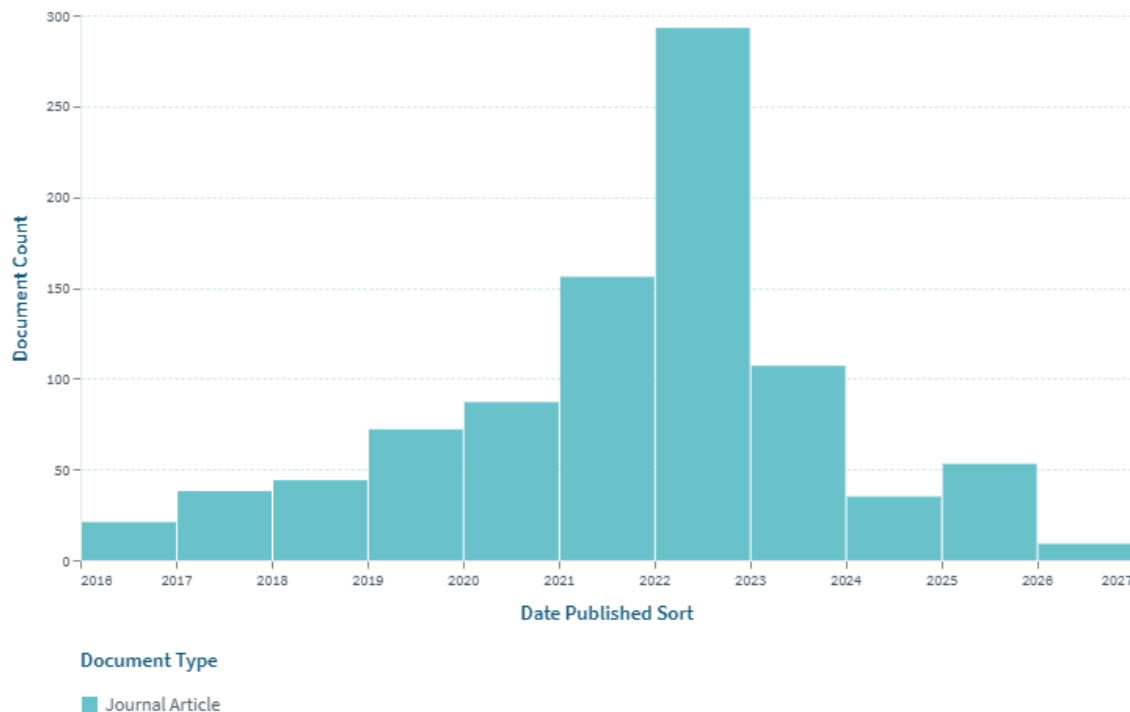
Pengikutsertaan data tahun 2026 dilakukan untuk merekam tren publikasi palingmutakhir serta melihat kontinuitas perkembangan riset terkini. Kemudian analisis data dilakukan menggunakan *tools VosViewer* untuk menggambarkan visualisasi jaringan, *density*, dan *overlay*, terkait dengan publikasi perlindungan masyarakat di Indonesia tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Publikasi Tahunan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat peningkatan tren penelitian dengan topik perlindungan masyarakat. Visualisasi data yang diperoleh melalui data Lens.org

menyajikan tren fluktuasi terkait publikasi perlindungan masyarakat khususnya di Indonesia dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.



Gambar 2. Tren Publikasi Perlindungan Masyarakat di Indonesia

Secara berurutan, jumlah publikasi mulai tahun 2016 adalah sejumlah 21 dokumen dan tahun 2017 memperoleh 38 artikel. Hingga tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan positif, dan mencapai puncak publikasi pada tahun 2022 yaitu sejumlah 293 artikel. Tahun berikutnya, terjadi penurunan publikasi yaitu menjadi 107 (2023), 35 (2024), 53 (2025), dan 9 (2026). Merujuk pada gambar 2, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga fase yang mempublikasikan topik tersebut.

Fase pertama yaitu pada tahun 2016 hingga 2019, jumlah literatur ilmiah terkait perlindungan masyarakat masih relative terbatas. Keterbatasan artikel tersebut mengindikasikan bahwa topik mengenai perlindungan masyarakat belum dilihat sebagai objek kajian strategis oleh para peneliti di Indonesia. Riset-riset yang terbit pada fase ini umumnya didominasi oleh analisis perspektif normative-yuridis dan administrasi publik. Publikasi pada fase ini tidak berfokus pada pengamanan fisik

konvensional, tetapi menganalisis secara mendalam aspek pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat (seperti perlindungan hutan adat dan sengketa tanah ulayat), perlindungan hukum bagi kelompok rentan (khususnya anak dan korban tindak pidana), serta evaluasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di tingkat pemerintah daerah dan tata kelola keuanhan desa. Adapun isu keamanan lingkungan baru muncul secara parsial dalam konteks kesiapsiagaan komunitas lokal dalam menghadapi bencana alam.

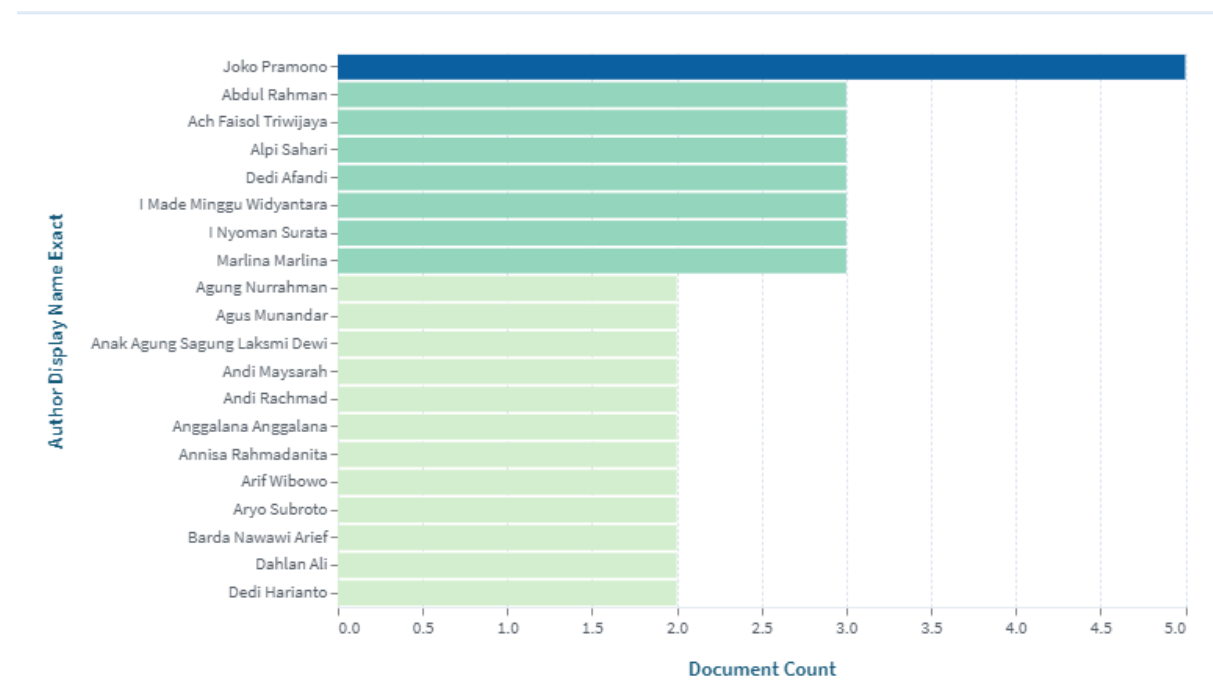
Fase kedua, mengalami lonjakan publikasi, dengan terbitnya 87 artikel pada tahun 2020, lalu meningkat tajam menjadi 156 artikel pada tahun 2021, dan mencapai puncak publikasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 293 artikel. Ledakan riset pada fase kedua didorong oleh adanya perubahan regulasi dan krisis kesehatan secara makro. Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 memberikan landasan institusional baru bagi penataan ketenteraman umum. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun tersebut juga terjadi pandemi Covid-19 yang mendorong konsep perlindungan masyarakat menjadi instrumen pertahanan sosial yang hidup. Publikasi ilmiah pada

tahun 2021 dan 2022 secara masif diisi oleh riset terkait kearifan lokal tingkat akar rumput (seperti Gerakan *jogo tonggo*), yaitu elemen perlindungan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mitigasi, penegakan protokol kesehatan, dan penyaluran jaring pengaman sosial di desa-desa. Fase ketiga, menunjukkan adanya penurunan jumlah publikasi yang cukup signifikan. Penurunan tersebut mengindikasikan terjadinya titik jenuh dalam lingkaran akademisi. Menurunnya jumlah publikasi pasca-pandemi menunjukkan bahwa kajian perlindungan masyarakat memerlukan dorongan arah baru (*novelty*), misalnya dengan mengalihkan fokus dari respons krisis konvensional menuju modernisasi teknologi pengamanan lingkungan, digitalisasi kelembagaan sosial, dan integrasi sistem perlindungan hukum berbasis komunitas di era digitalisasi.

2. Produktivitas Penulis

Visualiasi berikutnya berkaitan dengan seberapa produktif penulis melakukan penelitian bertema perlindungan masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Kontribusi Penulis dalam Publikasi Perlindungan Masyarakat



Merujuk gambar 3, diketahui bahwa terdapat beberapa penulis Indonesia yang turut berpartisipasi secara aktif mempublikasikan topik perlindungan masyarakat. Berdasarkan visualisasi data tersebut, distribusi sebaran publikasi diantara para peneliti cenderung tersebar secara merata dengan dominasi figure tertentu yang memiliki konsistensi fokus lokus atau spesialisasi keilmuan yang jelas. Posisi puncak produktivitas diperoleh Joko Pramono dengan jumlah 5 publikasi ilmiah. Lebih lanjut diketahui bahwa peneliti tersebut memiliki konsistensi kajian yang sangat spesifik pada penguatan kapasitas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat

kelurahan, dengan lokus yang berpusat di wilayah Surakarta (seperti Kelurahan Manahan dan Pucungswit). Pemikiran Pramono berfokus pada model tata kelola keamanan lokal melalui penguatan manajemen ketertiban umum (Pramono, 2025), optimalisasi kelembagaan sipil (Pramono & Prianggodo, 2023), program peningkatan kapasitas personel (Pramono & Suranto, 2022), hingga bentuk pelatihan praktis dalam rangka peningkatan kesadaran swadaya keamanan masyarakat di tingkat akar rumput (Pramono & Setyawan, 2026). Peneliti tersebut menjadi representasi peneliti empiris yang memotret dinamika perlindungan masyarakat secara

langsung dari unit pemerintahan terkecil di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat kelompok peneliti dengan kontribusi masing-masing sejumlah tiga publikasi ilmiah, yaitu Abdul Rahman, Ach Faisol Triwijaya, Alpi Sahari, Dedi Afandi, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Surata, dan Marlina Marlina. Kelompok peneliti yang diwakili oleh Alpi Sahari dan rekan sejawatnya relative banyak mengaitkan topik perlindungan masyarakat dengan kacamata hukum pidana praktis perlindungan korban, seperti penegakan hukum di ruang digital (Lubis et al., 2022), pemberantasan peredaran gelap narkoba (Nasution et al., 2022), hingga perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan zat terlarang melalui mekanisme sistem jalur ganda (Andito et al., 2022).

Kontribusi berikutnya ditunjukkan oleh kontribusi minimal secara jumlah yaitu sebanyak dua publikasi. Kemunculan nama pakar hukum pidana di Indonesia, Barda Nawawi Arief, memberikan justifikasi akademik yang sangat kuat. Karya Kamalludin & Arief (2018) mengkaji terkait formulasi alternatif penjatuhan sanksi untuk meringankan pidana penjara dan karya lainnya membahas tentang kepadatan narapidana di Lembaga permasyarakatan Indonesia yang dianalisis dari perspektif kebijakan makro. (Mulyono & Arief, 2016).

3. Distribusi Bidang Kajian

Visualiasi berikutnya berkaitan dengan distribusi bidang kajian yang secara spesifik membahas penelitian bertema perlindungan masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Word Cloud dalam Publikasi Perlindungan Masyarakat

Gambar 4. menunjukkan tren publikasi terbanyak yang membahas topik perlindungan masyarakat di Indonesia. Penulis mengklasifikasinya ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yang berkaitan dengan bidang politik dan hukum normatif, kelompok kedua berhubungan dengan *social capital*, dan kelompok ketiga berkaitan dengan sektor bisnis dan teknologi informasi.

Pada kelompok pertama, diketahui bahwa sebagian besar publikasi yaitu sejumlah 504 dokumen membahas topik perlindungan masyarakat dari perspektif *political science*. Selanjutnya, diikuti oleh rumpun *humanities* (297 dokumen), *philosophy* (257 dokumen), dan *law* (225 dokumen). Hal yang menarik adalah, praktik pengamanan lingkungan oleh masyarakat atau Linmas, juga dibahas dalam perspektif *law enforcement* (30 dokumen), dan diperkuat pula dalam payung hukum baku yang sifatnya *normatif* (64 dokumen). Artinya, kajian hukum tersebut tidak sebatas kajian teoretis tetapi juga dapat diimplementasikan di lapangan khususnya dalam pengkajian topik perlindungan masyarakat.

Pada kelompok kedua, terdapat keberagaman fokus kajian yang menonjolkan aspek humanis, yaitu perlindungan masyarakat mulai dikaji sebagai bentuk modal sosial. Riset mulai

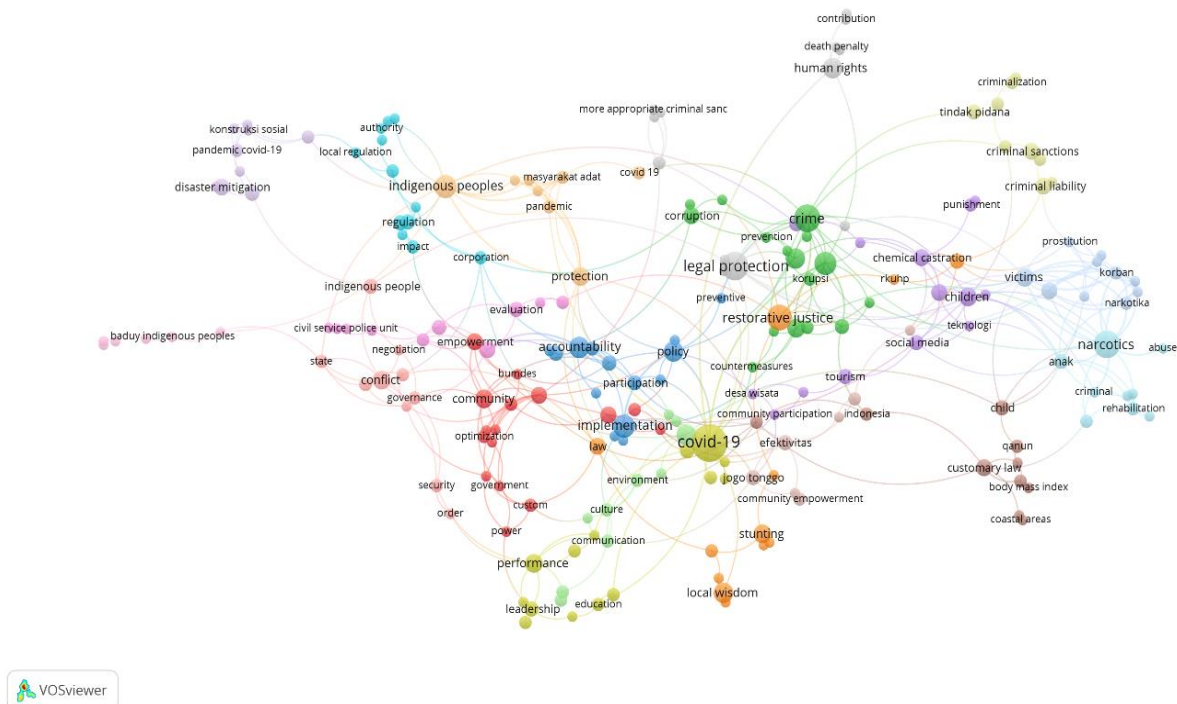
menunjukkan kejenuhan dalam urusan aturan kaku, dan mulai mengkaji dari ranah sosilogis (157 dokumen), dan psikologi (81 dokumen). Hal yang menarik adalah, kluster *medicine* (72 dokumen) pun turut serta membahas perlindungan masyarakat, yang juga dihubungkan dengan *infectious disease* (24 dokumen) dan *coronavirus disease 2018* (30 dokumen). Hal tersebut menunjukkan adanya eksistensi dari fungsi Linmas yang dapat menjadi benteng pertahanan sosial paling depan terutama saat kondisi masyarakat berada dalam pembatasan sosial.

Pada kelompok ketiga, mulai muncul isu modernitas yang meliputi sektor bisnis dan teknologi informasi. Munculnya bidang *business* (205 dokumen) dan *computer science* (104 dokumen) di tengah-tengah keamanan sipil merupakan perspektif baru yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Berikutnya, kehadiran elemen ekonomi (*Economics*, 59 dokumen, dan *Economic Justice*, 29 dokumen) mengindikasikan bahwa telah muncul kesadaran iklim usaha mikro di pedesaan yang didukung oleh jaminan rasa aman yang stabil. Kemunculan *computer science* tidak serta merta mengindikasikan bahwa literatur saat ini telah mengkaji aplikasi digital secara luas. Namun, hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi agenda riset masa depan untuk

mengembangkan inovasi teknologi pelayanan publik, seperti Pembangunan aplikasi pelaporan interaktif masyarakat berbasis Android, otomatisasi pengelolaan data bagi aparaturnya Satlinmas, hingga digitalisasi sistem peringatan dini bencana di desa/kelurahan.

4. Struktur Klaster Kata Kunci

Visualiasi berikutnya berkaitan dengan klaster kata kunci yang secara spesifik membahas penelitian bertema perlindungan masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Visualisasi *Network* dalam Publikasi Perlindungan Masyarakat di Indonesia

Gambar 5. menunjukkan visualisasi *network* (jaringan) kata kunci yang bersumber dari hasil *VOSviewer*. Gambar tersebut menunjukkan adanya penyebaran kata kunci yang terbagi ke dalam klaster-klaster strategis. Item Covid-19 merupakan salah satu item dominan yang berkaitan dalam publikasi Linmas. Item tersebut berhubungan langsung dengan topik lainnya seperti *jogo tonggo*, *community*

empowerment, hingga pola mitigasi dampak sosial di tingkat akar rumput. Kemunculan klaster tersebut menunjukkan bahwa para akademisi berupaya mengkaji peran perlindungan sipil yang dituntut adaptif saat menghadapi ancaman kesehatan global. Kebijakan pembatasan mobilitas di wilayah terluar, misalnya, terbukti dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi sekaligus memicu adanya

peningkatan ancaman baru di garis perbatasan (Alunaza et al., 2022). Pola riset tersebut kemudian bergeser, dari yang semula berfokus pada pertahanan konvensional menjadi berfokus pada jaminan hak kesehatan dasar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Wijayanti (2022). Berikutnya, diketahui bahwa pelatihan simulasi tanggap darurat bagi personel Linmas dinilai efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana berbasis masyarakat (Tahania et al., 2025).

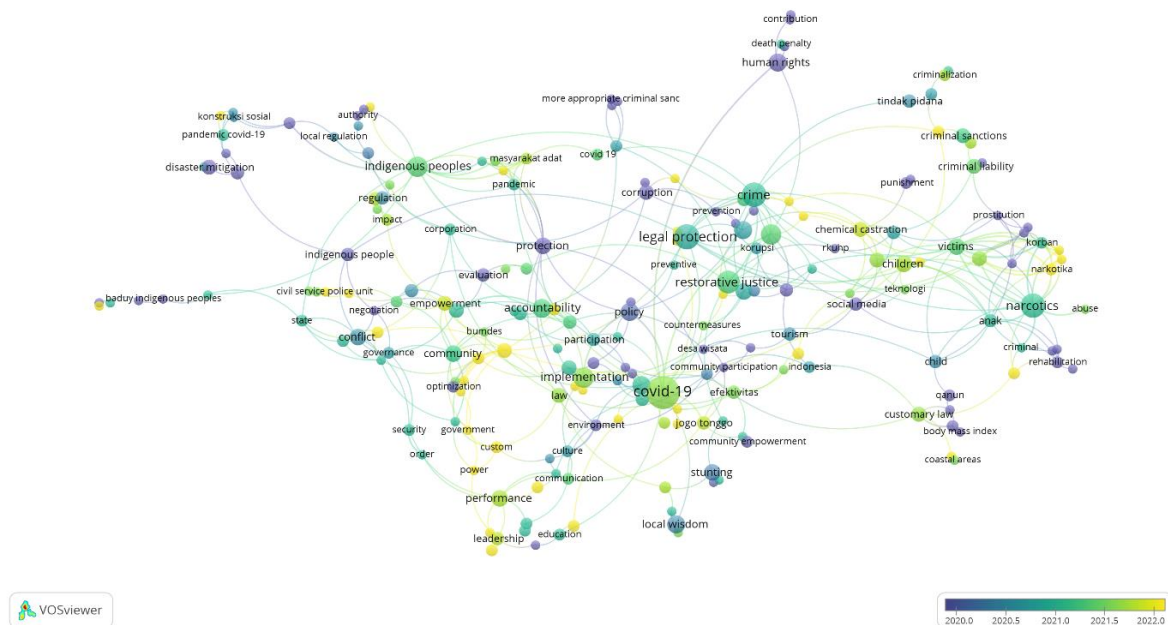
Selanjutnya, terdapat kata kunci *legal protection*, *restorative justice*, *crime*, dan *children*. Keterhubungan item tersebut menggambarkan adanya tuntutan pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dalam ekosistem perlindungan sipil. Kehadiran item *restorative justice* yang berkaitan dengan isu anak-anak menunjukkan adanya kejenuhan penelitian terhadap model penghukuman konvensional yang kaku. Fungsi Linmas atau aparat ketertiban umum di lapangan tidak lagi dilihat sebagai aparat yang melakukan tindakan represif (Wibisono et al., 2025).

Berikutnya, terdapat kata kunci *community*, *government*, *implementation*,

dan *indigenous people*. Hal tersebut menggambarkan bahwa sistem perlindungan masyarakat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah desa dan masyarakat adat. Peneliti terdahulu mengkaji secara menyeluruh terkait sejauh mana hukum negara dapat menyatu dengan hukum adat dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi hak-hak masyarakat di berbagai daerah (Azami, 2022). Di sisi lain, fokus utama riset pada kelompok ini menganalisis pentingnya aturan hukum yang tertulis dan resmi. Tanpada adanya payung hukum yang kuat dan kejelasan batas wilayah, maka upaya perlindungan lembaga adat akan menjadi sia-sia (Lung et al., 2024). Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Kurhayadi (2024) bahwa keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam upaya penguatan kelembagaan Satlinmas sebagai mitra strategis aparat keamanan ketika di lapangan.

5. Evolusi Tema Penelitian

Visualiasi berikutnya menyajikan evolusi tema penelitian, melalui *overlay visualization*. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Visualisasi *Overlay* dalam Publikasi Perlindungan Masyarakat di Indonesia

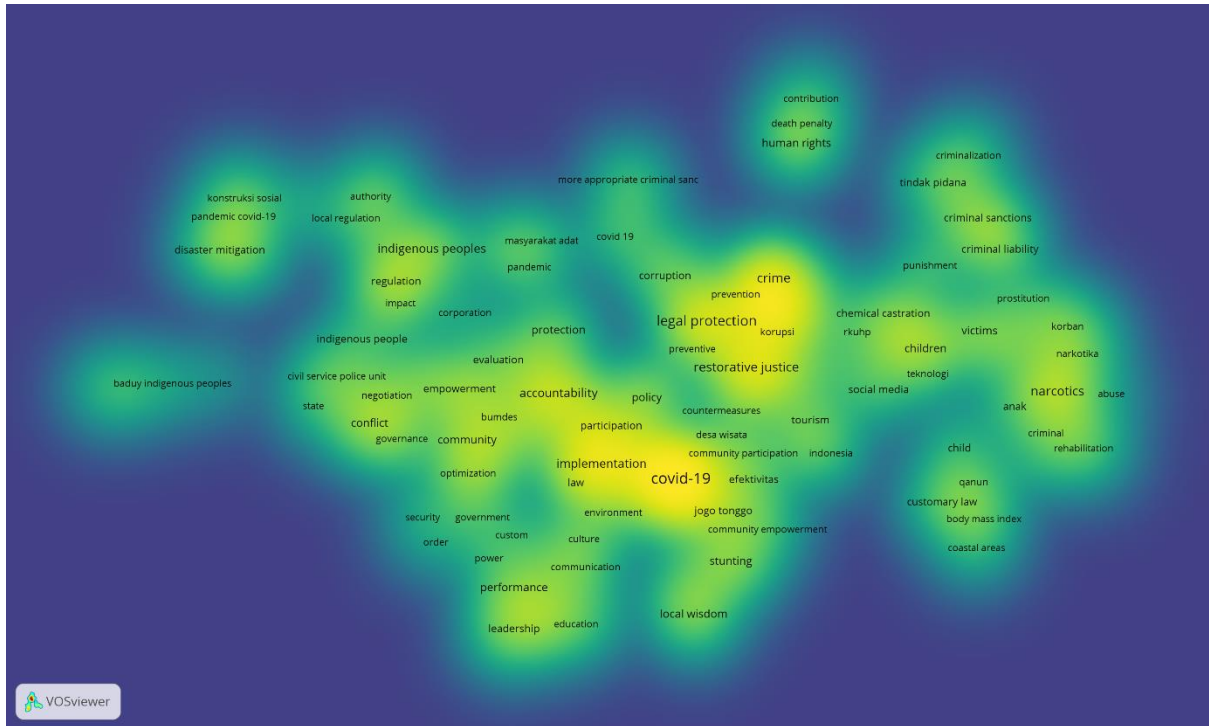
Gambar 6 merupakan visualisasi *overlay* terkait topik perlindungan masyarakat di Indonesia. Melalui gambar 6, dapat dianalisis tren publikasi berdasarkan waktu penelitian. Secara kronologis, publikasi awal sekitar tahun 2020 (warna ungu tua), menuju kuning terang (tren riset terbaru hingga tahun 2022 ke atas). Fase awal didominasi oleh isu *disaster mitigation*, *performance*, *protection*, dan *negotiation*. Fokus utama peneliti mengkaji pengukuran efisiensi kerja anggota Satlinmas di tingkat kecamatan, dengan menggunakan indikator kedisiplinan, kemampuan bekerjasama dengan masyarakat, dan kreativitas di lapangan (Anyik, 2019). Di sisi lain, konsep perlindungan masyarakat pada periode

tersebut juga dikaitkan dengan peran pemerintah dalam mitigasi bencana, terutama melalui penataan ruang yang aman, pelaksanaan program penyuluhan kebencanaan, dan penyediaan infrastruktur (Fadillah et al., 2020; Wahyuni & Sakir, 2020). Selanjutnya, periode tahun yang ditandai oleh item berwarna hijau. Pada periode ini fokus riset menganalisis efektivitas kebijakan pembatasan mobilitas, dan implikasi sosial-politik pandemi di wilayah perbatasan (Alunaza et al., 2022), hingga pemetaan fungsi posko kedaruratan di tingkat desa (Karim et al., 2021). Periode terbaru yaitu mempublikasikan topik perlindungan masyarakat yang diwakili oleh item *narcotics*, *criminal*, dan *power*

(item berwarna kuning). Penelitian terbaru dilakukan oleh Kurhayadi (2024) yang menegaskan adanya pelibatan aktif masyarakat dan peningkatan personal kelembagaan diharapkan dapat memperkuat peran Linmas di lapangan.

6. Tema Padat dan Tema yang Masih Terbatas

Visualisasi berikutnya menyajikan tingkat kejenuhan topik pada penelitian bertema perlindungan masyarakat di Indonesia, melalui *density visualization*. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Visualisasi *Density* dalam Publikasi Perlindungan Masyarakat di Indonesia

Gambar 7. merupakan visualisasi *density* yang menggambarkan kekuatan dan kejenuhan topik dalam publikasi perlindungan masyarakat. Terdapat dua klasifikasi yang memperlihatkan intensitas kepadatan yang berbeda, yaitu kepadatan paling ekstrem adalah yang berwarna kuning, sedangkan kepadatan lainnya berwarna hijau redup dan biru tua.

Item yang berwarna kuning paling luas berada di bagian bawah tengah yaitu item covid-19, yang berkaitan erat dengan item lainnya yaitu *implementation*, *policy*, dan *jogo tonggo*. Hal tersebut menggambarkan kejenuhan publikasi yang lahir akibat kedaruratan selama masa pandemi. Fokus riset didominasi oleh evaluasi kritis atas kebijakan strategi pemerintah pusat yang diturunkan di

tingkat kelurahan, seperti pembentukan posko penanganan covid-19 (Karim et al., 2021). Selanjutnya, pada area pinggir visualisasi yang didominasi oleh warna hijau redup dan biru tua menandakan adanya topik-topik yang jarang dieksplorasi oleh para peneliti. Diantaranya meliputi item *baduy indigenous peoples*, dan *customary law*, dan *coastal areas*. Kajian perlindungan lingkungan pesisir di tingkat daerah membutuhkan penguatan kapasitas aparat Linmas dalam menjaga stabilitas Kawasan (Majid et al., 2022). Begitupula dengan penegakan tata tertib sosial melalui hukum adat, sebagaimana temuan penelitian Davfid et al. (2022), yang menatakan bahwa peran perlindungan sipil bentukan pemerintah belum terintegrasi secara utuh ke dalam ekosistem hukum adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian bagi peneliti selanjutnya. Diantaranya terkait minimnya keterlibatan aparatur perlindungan masyarakat formal dalam tata kelola lingkungan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, peneliti di masa depan dapat mengembangkan fokus penelitian pada penguatan peran dan fungsi Linmas dalam tata kelola baik dalam bidang mitigasi bencana pesisir, penegakan hukum adat, dan perlindungan komunitas rentan.

7. Implikasi bagi Pengembangan Kajian Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini memperluas ruang diskusi pengembangan kajian bertema perlindungan masyarakat di Indonesia. Perlindungan masyarakat tidak lagi sekedar dipandang sebagai aktivitas ronda malam atau penegakan ketertiban formal, melainkan sebagai konsep multidimensi yang beririsan dengan modal sosial, adaptasi ekologis wilayah pesisir, dan pranata hukum adat. Di sisi lain, penguatan Satlinmas di lapangan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sistem peringatan dini, koordinasi, dan pelaporan kedaruratan di tingkat desa atau kelurahan.

KESIMPULAN

Penelitian bibliometrik telah memetakan perkembangan literatur ilmiah bertema perlindungan masyarakat di Indonesia selama periode tahun 2016 s.d. 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022, dengan 293 dokumen publikasi, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada periode setelahnya. Kajian ilmiah sejauh ini didominasi oleh perspektif ilmu politik, hukum normative, dan penegakan hukum formal. Sementara itu, visualisasi kepadatan mengidentifikasi

celah riset pada isu-isu berbasis kawasan pesisir, hukum adat, dan pelibatan masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pemetaan struktur pengetahuan perlindungan masyarakat secara multidimensi, dan kontribusi praktis sebagai pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun

penguatan kapasitas Satlinmas melalui pemanfaatan teknologi digital. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sumber database akademik yang digunakan hanya bersumber dari satu sumber yaitu Lens.org. Penelitian di masa depan direkomendasikan untuk dapat memperluas cakupan database yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., Mentari, M., Putri, A., & Ernianda, A. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1). <https://doi.org/10.37304/paris.v3i1.4198>
- Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>
- Anyik, D. (2019). Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v7i2.3084>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.648>
- Azima, M. F. (2019). *Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana (Studi Di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)* [Universitas Mataram]. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/M.-FAUZAN-AZIMA-D1A014191.pdf>
- Dahuri, D. (2022). *Home Politik Dan Hukum Kemendagri Terima Masukan Kendala Satuan Linmas dari Berbagai Daerah*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/498026/kemendagri-terima-masukan-kendala-satuan-linmas-dari-berbagai-daerah>
- Davfid, L., Done, H., & Samaluddin, S. (2022). Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Kawasan Ombo Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*. <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.770>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133.

- 10.1016/j.jbusres.2021.04.070
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Fadillah, M., Sugiharti, D. K., & Radjab, A. M. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana. *Magistra Law Review*, 1(02). <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i2.1604>
- Harsoyo. (2021). The Role of SATLINMAS in Actualizing Public Safety and Order. *Forum Ilmu Sosial*, 48(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2213583>
- Hasim, W. R. H. M. (2022). *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Takalar* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9026/>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2018). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *AL-ADALAH*, 15(1). <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931>
- Karim, I. K., Frandika, R., & Pambudi, S. S. I. (2021). Quo Vadis Posko Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2). <https://doi.org/10.37145/7j73v802>
- Kurhayadi. (2024). Enhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4995>
- Lubis, M. R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi di Polda Sumatera Utara). *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1183>
- Lung, J. P., Kuspaningrum, E., & Subroto, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2805>
- Majid, M. N., Cahyono, W. E., & Deviyanti, I. G. A. S. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Yang Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan Pesisir. *Jurnal SENOPATI Sustainability Ergonomics Optimization and Application of Industrial Engineering*, 3(2). <https://doi.org/10.31284/j.senopati.2022.v3i2.2795>
- Masrinanda, N. S., & Pujayanti, L. P. V. A. (2025). *Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/24695/>

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>
- Nasution, M., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.1280>
- Nugroho, D. S., & Supardal. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. *The Journalish: Social and Government*, 3(2). <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72.
- Pramono, J. (2025). Strengthening Local Security Governance: A Study of Public Order and Community Protection Management in Manahan Urban Village, Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 16(02). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/jap.v16i02.35292>
- Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Civil Protection Model in Indonesia Through Optimizing Satlinmas. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i2.50326>
- Pramono, J., & Setyawan, D. (2026). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Di Kelurahan Manahan, Surakarta. *Ganesha: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.36728/ganesha.v6i1.5582>
- Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)*, 2(1). <https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4599>
- Sesa, W. L., Jamal, M., & Saleh, M. H. (2026). Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Tana Mana*, 7(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1552>
- Tahania, R. A., Ramadhanb, M. I., Zulfadliansyahb, M. T., Isyaracsaa, M. Y., Juliania, A., Vortunaa, A. A. D.,

- Udzmatillah, H., Ruslan, D. R., Kaidallaha, M. A., Rivaldya, A. J., & Hendrawati, T. D. (2025). Permemberdayaan Linmas dalam Mitigasi Bencana Berbasis Desa di Pasir Suren. *Journal OfInnovation AndSustainable Empowerment*, 4. /https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.169
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring scholarly impact: Methods and practice*. Springer. 10.1007/978-3-319-10377-8_13
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3
- Wahyuni, H., & Sakir, S. (2020). Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Sleman. *Aristo*, 9(1). https://doi.org/10.24269/ars.v9i1.2366
- Wibisono, G., Sutrisno, E., & Sanusi, S. (2025). Legal Review Of Main Duties And Functions Linmas In Implementing Order Public. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10698
- Wijayanti, C. A. (2022). Kebijakan Hukum Perlindungan Masyarakat Terhadap Vaksinasi Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 03(02). https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3250
- Yusmiarni., Hardimen., & Saputra, H. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2). https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/1275/855